



# Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Kebijakan & Kelembagaan Pariwisata

- Menunjukkan sikap kritis, profesional, dan bertanggung jawab dalam memahami kebijakan dan tata kelola pariwisata.
- Menguasai konsep kebijakan publik dan sistem kelembagaan pariwisata pada tingkat lokal, nasional dan internasional.
- Mampu mengevaluasi implementasi kebijakan serta merumuskan rekomendasi strategis untuk penguatan kelembagaan pariwisata.





# Why are government involved in tourism?

- Pemerintah mempunyai kemampuan untuk menjamin stabilitas politik, keamanan, kerangka hukum dan keuangan yang sangat dibutuhkan untuk berjalannya industri pariwisata
- Pemerintah dapat menyediakan infrastruktur dan fasilitas umum
- Pemerintah yang dapat bernegosiasi dan membuat perjanjian dengan pemerintahan negara lain untuk hal-hal seperti prosedur imigrasi dan ijin terbang atau mendarat di sebuah wilayah



	U. S. A.	1	1.10840	1.24170
	JAPAN	1	7.27570	8.11720
	CANADA	1	0.06480	0.07250
	INDONESIA	1000	5.36340	6.02430
	NEW ZEALAND	1	0.48450	0.70620
	VIET NAM	1000	4.83290	5.55370
			0.29640	0.43330
			7.09510	8.22780



# Why are government involved in tourism?

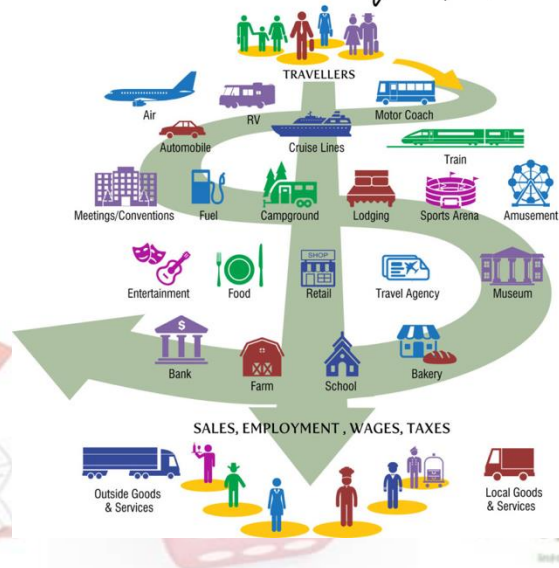
**+5%** **1.4 billion**  
Total international tourist arrivals

**+4%** **USD 1.7 trillion**  
Total international tourism exports  
(International tourism receipts + passenger transport)

- Pentingnya sektor pariwisata bagi sebagian besar pemerintah negara-negara di dunia
- Pariwisata lebih dari sekedar industri dan aktivitas ekonomi, ia adalah fenomena sosial yang dinamis & universal yang mempengaruhi sebagian besar negara-negara di dunia dan masyarakatnya
- Dampak sosial ekonomi pariwisata: penghasilan, penyerapan tenaga kerja, naiknya taraf hidup

## DYNAMIC CONNECTIONS

*Tourism adds value every step of the way!*



**ECO**   
**TOURISM**

# Why are government involved in tourism?

- Pemerintah terlibat dalam pariwisata juga karena masalah-masalah yang dapat ditimbulkan dari sektor pariwisata serta dampaknya yang tidak selalu baik
- Masalah-masalah sektor pariwisata, antara lain:
  - Dampak sosial, budaya dan lingkungan
  - Isu penguasaan kekayaan alam untuk golongan tertentu dan bukan untuk masyarakat secara umum
  - Persaingan usaha, dinamika pariwisata internasional maupun domestik karena berbagai situasi, misalnya: isu kesehatan, bencana alam, krisis ekonomi maupun sosial
  - Akibat yang dapat ditimbulkan oleh mass tourism





# Studi Kasus: Pajak Pariwisata Bali

- Masalah: Overtourism
- Kebijakan: Foreign Tourist Levy
- Kontroversi: Keadilan & transparansi (kejelasan pengelolaan)
- Dampak: Pendapatan untuk keberlanjutan

Available language

## Welcome to Bali

Where Your Journey Supports Sustainable Destinations

To nurture the beauty of Bali's customs, traditions, arts, and local wisdom, the Bali Provincial Government introduces the Foreign Tourist Levy, effective February 14, 2024.

**Foreign Tourist Levy**

**IDR 150,000/PERSON**

Paid 1 (one) time during travelling in Bali

**The Legal Basis :**

- Law Number 15 of 2023 concerning the Province of Bali.
- Bali Province Regional Regulation Number 6 of 2023 concerning Levy for Foreign Tourists for the Protection of Balinese Culture and Natural Environment.
- Bali Governor Regulation Number 2 of 2024 concerning the Procedures for the Payment of the Foreign Tourist Levy.

It is strongly suggested to make payment before departure to Bali

**#BaliLegacyJourney**

Contact us on WhatsApp  
**+62821 5758 6600**

Download on the

[lovebali.baliprov.go.id](https://lovebali.baliprov.go.id)



## Politik dalam Pariwisata

- Politik = Siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana
- Siapa mendapat izin investasi?
- Siapa menguasai ruang budaya?
- Siapa menikmati manfaat ekonomi?

## HGB dikuasai investor, warga adat Jimbaran minta tanahnya dikembalikan

Rizki Setyo Samudero - detikBali

Senin, 03 Feb 2025 11:44 WIB



Masyarakat Jimbaran yang tergabung dalam Kepet Adat audiensi dengan DPRD Bali, Denpasar, Senin (3/2/2025). (Rizky Setyo)

Foto: Masyarakat Jimbaran yang tergabung dalam Kepet Adat audiensi dengan DPRD Bali, Denpasar, Senin (3/2/2025). (Rizky Setyo)

# Segitiga Tata Kelola Pariwisata

Keseimbangan kepentingan

Pemerintah

Swasta

Masyarakat



# Prinsip Keterlibatan Pemerintah dalam Pariwisata



**Public interest  
(kepentingan umum)**



**Public Service (pelayanan umum)**



**Effectiveness (efektivitas)**



**Efficiency  
(efisiensi)**



**Accountability (dapat dipertanggungjawabkan)**

# Prinsip Keterlibatan Pemerintah dalam Pariwisata

## 1. Public Interest (Kepentingan Publik)

- Pariwisata harus dikembangkan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya keuntungan ekonomi semata.
- Destinasi wisata harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan wisatawan, masyarakat lokal, dan keberlanjutan lingkungan.
- Regulasi dan kebijakan pariwisata sebaiknya berorientasi pada manfaat jangka panjang, seperti pelestarian budaya, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Public Service (Pelayanan Publik)

- Pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor pariwisata harus menyediakan layanan yang memastikan aksesibilitas, keselamatan, dan kenyamanan bagi wisatawan.
- Infrastruktur pariwisata, seperti transportasi, informasi wisata, dan fasilitas publik, harus mudah diakses dan berkualitas baik.
- Penyediaan layanan berbasis teknologi, seperti digitalisasi informasi dan sistem reservasi yang transparan, dapat meningkatkan pengalaman wisatawan dan mendukung ekonomi lokal.





# Prinsip Keterlibatan Pemerintah dalam Pariwisata

## 5. Accountability (Akuntabilitas)

- Transparansi dalam pengelolaan dana publik dan investasi di sektor pariwisata harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
- Laporan berkala dan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi kebijakan pariwisata meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor ini.
- Semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, bisnis, dan masyarakat, harus bertanggung jawab atas dampak dari aktivitas pariwisata, baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan.



# Dari Kekuasaan ke Kebijakan

- Bagaimana Kebijakan Pariwisata Dibentuk?
- Agenda → Formulasi → Adopsi → Implementasi → Evaluasi





# Contoh: Kuota Pengunjung Borobudur

- Agenda: Kepadatan pengunjung
- Formulasi: Pembatasan tiket
- Adopsi & Implementasi: Sistem daring
- Evaluasi: Respons publik

## Pilih tipe aktivitas di Candi Borobudur



 Borobudur

### Naik Candi Borobudur

Tiket masuk dengan **akses naik hingga ke candi Borobudur**, sudah termasuk akses ke area pelataran Borobudur.

Mulai dari  
**Rp 75.000**

**Pilih Tiket** →



 Borobudur

### Pelataran Borobudur

Tiket masuk ke area pelataran Borobudur (area halaman borobudur), **tidak termasuk naik candi**.

Mulai dari  
**Rp 25.000**

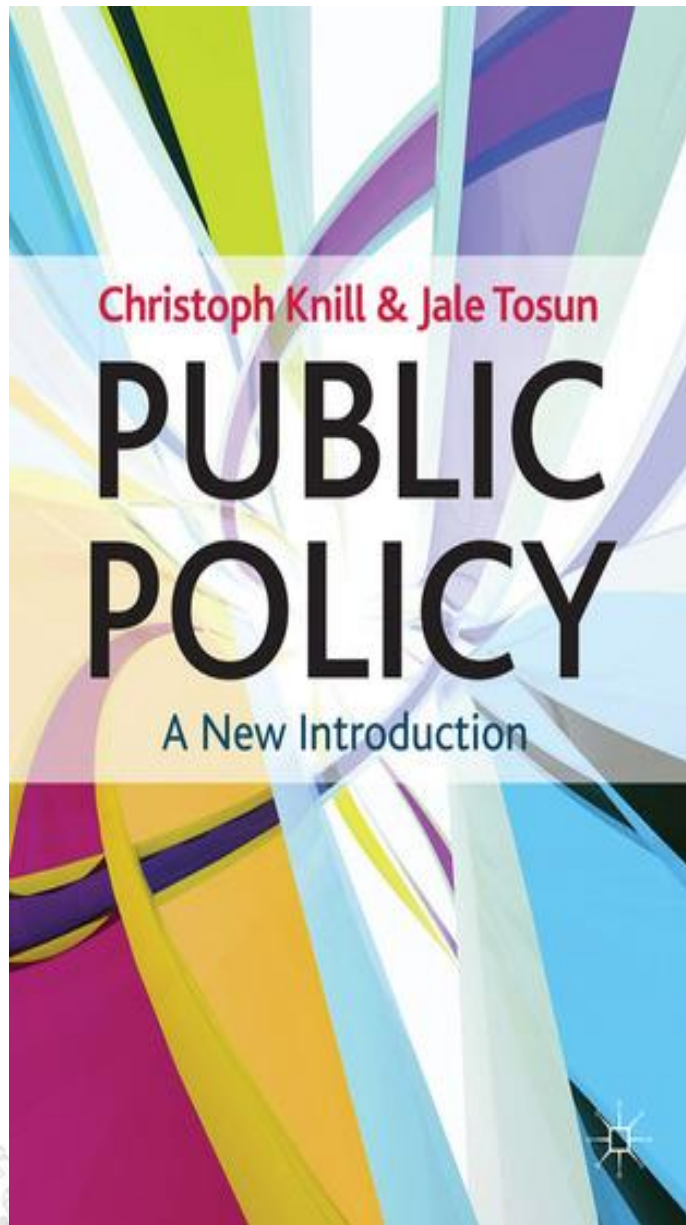
**Pilih Tiket** →

# Kebijakan

Kebijakan(Policy) adalah suatu **kumpulan keputusan** yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan (Budiarjo, 2000).

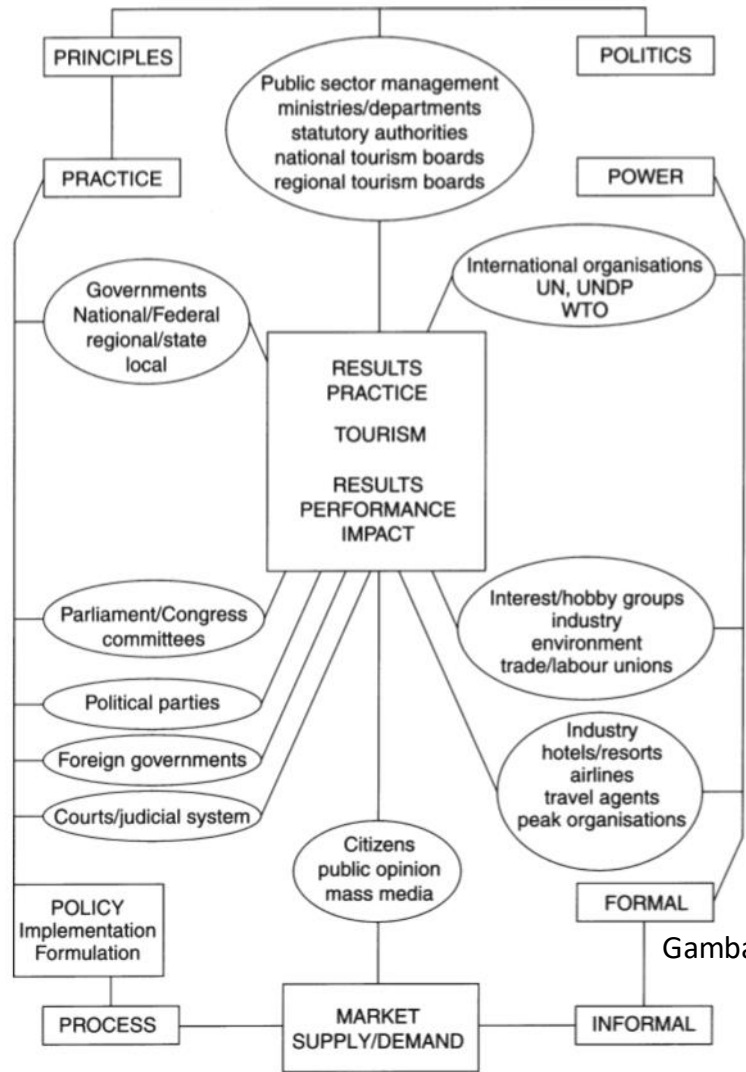
**Obyek** dari ilmu politik adalah **kebijakan pemerintah**, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya (Hoogerwerf dalam Budiarjo, 2000)





- Kebijakan publik adalah kegiatan untuk menengahi konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat
- Kebijakan publik dirancang untuk menyeimbangkan ketimpangan yang terjadi serta merupakan stimulasi bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam merumuskan tujuan bersama agar tujuan tersebut tercapai.





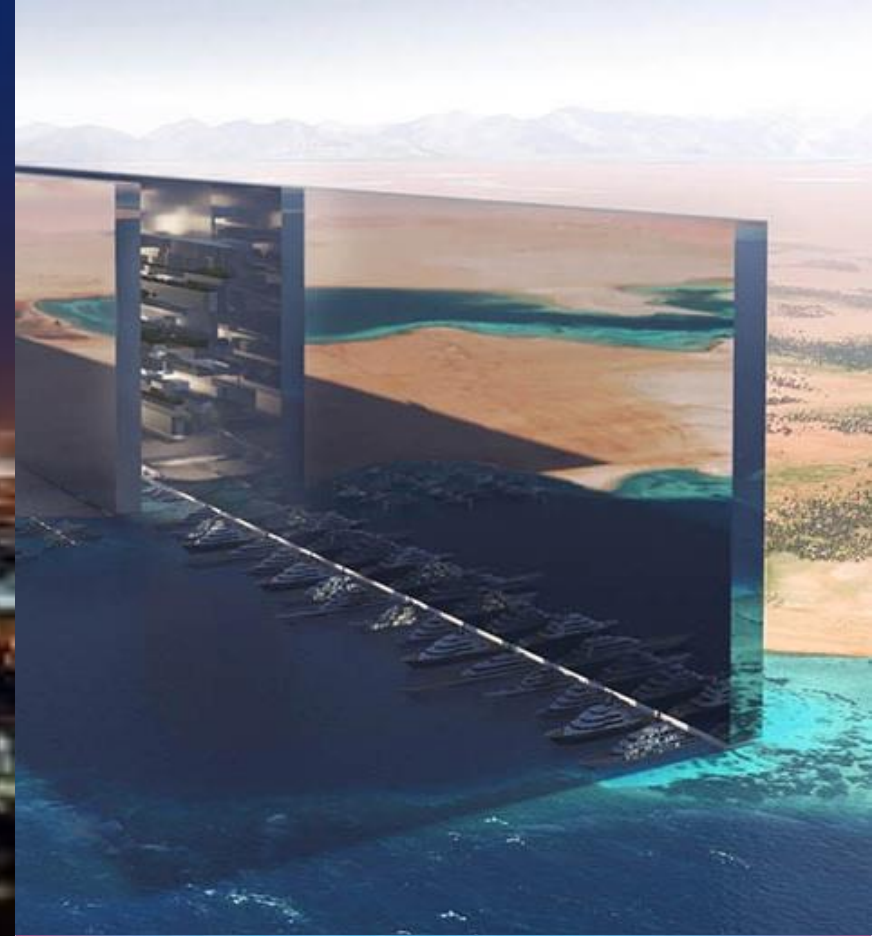
Gambar. Tourism: the political, administrative and industrial environment

Manajemen sektor publik untuk pariwisata adalah **kegiatan yang kompleks dan beroperasi di lingkungan pemerintahan, kebijakan publik, sistem politik dan kekuasaan**. Memperhatikan prinsip-prinsip seperti **kepentingan umum, pelayanan publik, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas**.

Chapter 1: Ruang lingkup politik dan kebijakan

Elliot, James. 1997. Tourism Politics and public sector management. Routledge. London and New York





# Keputusan Politik dan Pengembangan Destinasi Baru: Studi Kasus Arab Saudi



## UNSUR-UNSUR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK



# Instrumen Kebijakan Pemerintah :

- 
- **Instrumen informasi** – menggunakan informasi dan pengetahuan yang dimiliki pemerintah untuk mempengaruhi interest (minat atau arah kebijakan) sektor publik dan swasta
  - **Instrumen Keuangan** – menggunakan sumber daya keuangan dan sumberdaya lain yang dapat memaksa/menekan dan memanipulasi perilaku
  - **Instrumen Kekuasaan/Kewenangan** – Menggunakan aturan hukum dan kekuasaan resmi yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengarahkan perilaku
  - **Instrumen Organisasi** - menggunakan organisasi dan lembaga pemerintah untuk membentuk perilaku organisasi sesuai dengan tujuan dasarnya.

# CONTOH PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK DENGAN MEMPERHATIKAN UNSUR-UNSURNYA



## Tujuan kebijakan

- Peningkatan citra pariwisata Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing

## Masalah

- Citra destinasi yang negatif karena hal-hal: bencana dan penanganannya, persoalan keamanan

## Tuntutan (demand)

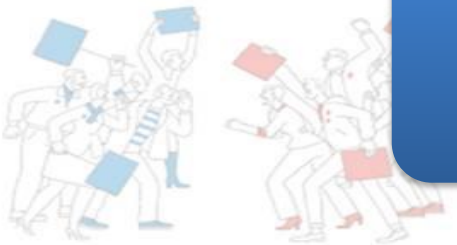
- Tuntutan dari pemerintah daerah dan swasta di dalam negeri untuk pemerintah pusat memperbaiki citra
- Kebutuhan pihak di luar negeri (calon wisatawan, tour operator, dll) untuk memperoleh informasi yang valid dan cepat tentang situasi di Indonesia

## Dampak (outcomes)

- Meningkatnya citra Indonesia sebagai destinasi yang aman, nyaman, dan berdaya saing

## Sarana (policy instruments)

- Instrumen informasi
- Instrumen keuangan
- Instrumen kekuasaan
- Instrumen organisasi





# Permasalahan Kepariwisata Indonesia

## Permasalahan yang Muncul Ke Permukaan



## Sumber Permasalahan Utama Pariwisata

